

Accepted: Juli 2021	Revised: Juli 2021	Published: September 2021
-------------------------------	------------------------------	-------------------------------------

Implementasi Pendidikan Karakter Anti Korupsi di MAN 4 Kediri

Muhamad Faiz Amiruddin

Binti Nur Afifah

Institut Agama Islam Faqih Asy'ari Kediri, Indonesia

e-mail:faizamiruddin@gmail.com

Abstract

Corruption in Indonesia has been seen as an extraordinary crime. It is necessary to make efforts to fortify and eradicate it. The cheapest and most effective way to eradicate corruption is by taking preventive measures, including through anti-corruption education lessons and instilling the values of integrity (non-corrupt behavior) to future generations. Madrasah Negeri Man 4 Kediri has implemented anti-corruption education quite well, namely by giving teachers training on how to apply 9 anti-corruption characters to students consisting of honest, hard working, disciplined, independent, fair, responsible, caring, simple, and independent.

Keywords : *corruption, education*

Abstrak

Korupsi di Indonesia telah dilihat sebagai kejahatan luar biasa. Hal ini diperlukan untuk melakukan upaya untuk membentengi dan memberantasnya. Cara termurah dan paling efektif untuk memberantas korupsi adalah dengan mengambil langkah-langkah pencegahan, termasuk melalui pelajaran pendidikan antikorupsi dan menanamkan nilai-nilai integritas (perilaku non-koruptor) kepada generasi mendatang. Madrasah Negeri Man 4 Kediri telah melaksanakan pendidikan antikorupsi dengan cukup baik, yaitu dengan memberikan pelatihan kepada guru tentang cara menerapkan 9 karakter antikorupsi kepada siswa yang terdiri dari jujur, pekerja keras, disiplin, mandiri, adil, bertanggung jawab, peduli, sederhana, dan mandiri.

Kata kunci : korupsi, pendidikan

Pendahuluan

Korupsi merupakan tindakan seseorang yang menyalah gunakan kepercayaan dalam suatu masalah atau organisasi untuk mendapatkan keuntungan. Korupsi merupakan suatu kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) yang telah tumbuh seiring dengan perkembangan peradaban manusia. Menurut Pengertian Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengartikan bahwa Korupsi adalah Setiap orang yang dikategorikan melawan hukum, melakukan perbuatan memperkayadiri sendiri, menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan maupun kesempatan atau sarana yang adapadanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara.”

Tindak pidana korupsi di Indonesia hingga saat ini menjadi salah satu penyebab terpuruknya sistem perekonomian bangsa yang dibuktikan dengan semakin meluasnya tindak pidana korupsi dalam masyarakat dengan melihat perkembangannya yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa sisi negatif, tidak hanya terhadap kehidupan perekonomian nasional dengan merugikan kondisi keuangan negara, namun juga melanggar hak-hak sosial dan ekonomi pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Hal ini disebabkan karena korupsi di Indonesia terjadi secara sistematis dan meluas dengan kurangnya pertanggungjawaban pidana yang seharusnya dilakukan oleh pelaku tindak pidana terkait.

Tindak pidana korupsi dalam jumlah besar berpotensi merugikan keuangannegara sehingga dapat mengganggu sumber daya pembangunan dan membahayakan stabilitas politik suatu negara. Korupsi juga dapat diindikasikan sebagai alasan timbulnya bahaya terhadap keamanan umat manusia, karena telah merambah ke dunia pendidikan, kesehatan, penyediaan sandang pangan rakyat, keagamaan, dan fungsi-fungsi pelayanan sosial lain. Dalam penyusunan di dunia perdagangan, baik 2 yang bersifat domestik maupun transnasional, korupsi jelas-jelas telah merusak mental pejabat. Demi mengejar kekayaan, para pejabat negara tidak takut melanggar hukum negara. Kasus-kasus tindak pidana korupsi sulit diungkap karena para pelakunya terkait dengan wewenang atau kekuasaannya yang dimiliki.

Untuk menyelesaikan permasalahan ini diperlukan penyelesaian yang sifatnya khusus dan luar biasa pula dikarenakan tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa “ *Extra ordinary crime* “, juga dilakukan dengan sistematis. Penyelesaian hukum di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari

adanya sistem pembuktian, pembuktian merupakan titik sentral pemeriksaan perkara dalam persidangan.

Metode

Penelitian yang kami gunakan ini menggunakan pendekatan kualitatif serta *library research* karena penulis, menulis permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, tidak berkenaan dengan angka-angka, tetapi penelitian yang kami gunakan ini mendeskripsikan atau menggambarkan tentang perkembangan pendidikan karakter anti korupsi melalui macam-macam cara implementasi pembelajaran. Dan penelitian ini hampir dari beberapa penulisannya berdasar atas kajian pustaka atau kajian literer. Karena sebagian penulisan berasal dari kajian literer atau kepustakaan (*liberary research*) maka dari itu data yang dikumpulkan dan dianalisis berasal dari dokumentasi lain, seperti tulisan jurnal, majalah atau buku, dan lain sebagainya.

Hasil penelitian dan Pembahasan

Berdasarkan penyajian data peneliti di dapatkan kesimpulan, Madrasah Negeri 4 Kediri terkait dengan implementasi pelaksanaan pendidikan karakter dan anti korupsi sudah dibilang cukup baik dalam pelaksanaannya. Namun, sebagian dari itu penerapannya masih belum berjalan maksimal.

Menyikapi fenomena kasus korupsi yang sedang marak terjadi, pendidikan pun melakukan pembelajaran untuk membentengi generasi-generasi yang akan meneruskan bangsa, salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan perubahan kurikulum. Inseri pendidikan karakter anti korupsi ke dalam kurikulum dan pembelajaran sehari-hari gencar sekali dibicarakan, mulai dari penguatan masuknya pendidikan karakter anti korupsi di tingkat prasekolah hingga perguruan tinggi di upayakan dengan maksimal. Kurikulum pendidikan anti karakter diharapkan nantinya akan masuk dalam silabus-silabus mata pelajaran. Sedangkan pengajarannya adalah guru-guru yang telah diberi training bagaimana mengajarkan nilai sembilan karakter antikorupsi yang terdiri dari jujur, kerja keras, disiplin, mandiri, adil, tanggung jawab, peduli, sederhana, dan berani.

Namun secara umum tujuan dari pendidikan karakter anti antikorupsi adalah 1) untuk pembentukan pengetahuan dan pemahaman mengenai bentuk korupsi dan aspek-aspeknya, 2) pengubahan sikap dan persepsi terhadap korupsi, 3)

pembentukan keterampilan dan kecakapan baru yang ditunjukkan untuk melawan korupsi¹. Ketiga dari tujuan pendidikan karakter anti korupsi tadi dapat dicapai apabila terjadi sinergi antara kondisi keadaan lingkungan pendidikan dan keadaan masyarakat. Pendidikan karakter anti korupsi tidak akan bisa berhasil jika tidak berada di lingkungan pendidikan. Dalam hal ini lembaga berperan penting untuk membentuk jiwa-jiwa generasi penerus bangsa yang anti korupsi.

Halnya penerapan pendidikan karakter anti korupsi merupakan sebagian dari usaha guru dalam bimbingan pembelajaran karakter guna mencetak generasi yang baik, berbudi luhur, berakhlak karimah, serta bertanggung jawab untuk kehidupannya di keseharian dan di masa yang akan datang. Namun demikian dalam pendidikan karakter di Madrasah Negeri 4 Kediri ini penerapannya kepada siswa masih diperlukan kerja sama antara pengawas Madrasah tersebut, yang di antaranya adalah kepala sekolah, dan para staf-staf tenaga Madrasah.

Dalam implementasi pendidikan karakter di Madrasah ini para staf-staf atau guru-guru Madrasah biasanya menerapkan pendidikan karakter dengan memadukannya di jam-jam pembelajaran kelas. seperti contoh dalam pembelajaran pendidikan agama islam, guru agama di Madrasah tersebut memberikan pengajaran tentang gambaran mencuri dalam bentuk hal sepele seperti kebiasaan tidak mengembalikan barang atau peralatan sekolah milik teman sekelasnya sendiri. Contoh dari hal kecil ini adalah sebagian bentuk dari pendidikan karakter yang biasanya diterapkan oleh pendidik tersebut. Pengajaran ini sedikit atau tidaknya masih berpengaruh kepada siswa.

Tak hanya itu para pengawas Madrasah juga menjelaskan kepada para orang tua siswa untuk ikut berperan dalam menerapkan pendidikan karakter anaknya sendiri di kehidupan lingkungannya maupun di sekolahnya. Jika mengetahui manfaat yang di peroleh dari pendidikan karakter atau pendidikan pencegahan korupsi berbasis keluarga ini berhasil. Para pengawas Madrasah mampu mewujudkan internalisasi nilai-nilai sehingga siswa dapat berperilaku jujur di kesehariannya. Namun, korelasi pendidikan karakter ini masuk dalam kategori cukup rendah. Besarnya sumbangan pendidikan karakter anti korupsi dalam keluarga terhadap siswa atau anak dikirakan 60% sehingga cukup baik pendidikan karakter dalam keluarga maka semakin baik juga karakter anti

¹ Lukman Hakim, *Model Integrasi Pendidikan Antikorupsi Dalam Kurikulum Pendidikan Islam*, jurnal Pendidikan Islam-Ta'alim. Vol. 10, No.2, 2012=145

korupsi pada diri siswa atau anak. Karena baik buruknya siswa atau anak ditentukan oleh pendidikan yang diperolehnya baik itu pada waktu dengan keluarganya, lingkungan masyarakatnya, maupun lingkungan di sekolahan. Oleh karenanya keluarga disini sebagai struktur kecil masyarakat yang menjadi kunci awal dalam pembentukan nilai karakter anak untuk bangsa. Sebab itu pendidikan karakter anti korupsi harus ada integrasi pendekatan empat struktur utama pendidikan yang diantaranya adalah keluarga, lembaga pendidikan, masyarakat yang termasuk di dalamnya terdapat institusi keagamaan, dan yang terakhir Negara.²

Implementasi Pendidikan Karakter Anti Korupsi Melalui Pembelajaran CARILEM

Dalam implementasi atau penerapan pendidikan karakter anti korupsi di lembaga pendidikan (sekolah) harus diawali dari kepribadian seorang pendidik, karena seorang pendidik adalah peran atau model bagi anak didiknya. Karena anak didik melihat, meniru dan meneladani orang terdekatnya saat di lingkungan sekolah. Jika sebuah lembaga pendidikan konsisten dengan program bermutu yang disusun dan dilaksanakan dengan baik, hal ini akan mempengaruhi kepercayaan masyarakat sebagai konsumen pendidikan. Namun dalam penerapan pendidikan karakter dan anti korupsi memerlukan media dan metode khusus yang tepat agar tujuan pendidikan dapat tercapai. Di antara media dan metode pembelajaran yang sesuai dengan tingkat usia dan pemahaman anak yaitu dengan metode atau pembelajaran CARILEM pembelajaran CARILEM yaitu pembelajaran Membaca, Bercerita, dan menonton Film edukasi. contohnya disini guru menyarankan siswanya untuk melihat film yang beredukasi yaitu seperti *Laskar Pelangi*, *Jembatan Pensil*, *Negeri Lima Menara*, *Sekolah Rimba* dan masih banyak lagi untuk penerapan pembelajaran karakternya. penerapan pembelajaran ini juga terkait erat dengan harapan terciptanya sekolah yang berkualitas.³

a.² Fitri Mardiyanti, *Implementasi peran supervisor dalam pengawasan manajerial dan faktor-faktor memengaruhi kinerja tenaga administrasi sekolah*, Jurnal Cendekia, Vol. 3 No. 4, 2020=308-313

³ Intan Hestika Dhesi Ariani, Ba Aisyiyah Kajen, *Menumbuhkan Pendidikan Karakter Anti Korupsi Melalui Model Pembelajaran Carilem*, Jurnal Unimus, 2017.

Pembelajaran Karakter Anti Korupsi Berbasis Multimedia

Pendidikan anti korupsi sebagai sebuah metode pencegahan dalam pemberantasan korupsi merupakan model yang penerapannya berbeda-beda di berbagai jenjang pendidikan. Kalau di perguruan tinggi ada yang menjadikan pendidikan anti korupsi adalah mata pelajaran yang wajib. Namun jika di sekolah menengah atas pendidikan karakter anti korupsi ini sebagian masih sebagai sampingan pada mata pelajaran yang berkaitan dengan pendidikan karakter, dan secara tersirat sebenarnya materi pendidikan karakter anti korupsi juga menjadi bagian dari materi pendidikan agama.

Model pembelajaran pendidikan karakter anti korupsi yang dibahas ini merupakan model pendidikan yang disisipkan pada mata pelajaran Pancasila dan kewarganegaraan yang merupakan mata pelajaran wajib di semua program studi. Adapun model pembelajarannya menggunakan pendekatan kontekstual. Pembelajaran kontekstual (*contextual teaching and learning*) adalah konsep belajar di mana guru menghadirkan dunia nyata ke dalam kelas dan mendorong peserta didik membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, dan sementara siswa memperoleh pengetahuan dan keterampilan dari konteks yang terbatas sedikit demi sedikit, dan dari proses mengkonstruksikan sendiri, sebagai bekal untuk memecahkan masalah dalam kehidupannya sebagai anggota masyarakat. Dunia nyata yang dihadirkan dalam pembelajaran ini adalah melalui ilustrasi yang ditayangkan dengan alat bantu multimedia yang menampilkan berbagai contoh perilaku korupsi dan perilaku yang bukan korupsi serta sebab akibat yang mungkin terjadi dari setiap perbuatan korupsi dan perbuatan bukan korupsi.

Secara sederhana multimedia diartikan sebagai *lebih dari satu media* seperti teks, grafik, animasi, suara dan gambar. Namun pada bagian ini perpaduan dan kombinasi dua atau lebih jenis media ditekankan pada kendali komputer sebagai penggerak keseluruhan gabungan media tersebut. Seperti contohnya di lembaga pendidikan MAN 4 Kediri, menggunakan multimedia teks yang biasanya di pasang pada setiap dinding kelas, atau yang biasanya di kenal dengan poster teks yang isinya tentang kata-kata singkat dengan memiliki makna untuk mendongkrak siswa tentang pendidikan karakter anti korupsi-Nya masing-masing. Model pembelajaran multimedia ini tak hanya berfungsi bagi

siswanya saja tetapi juga berfungsi bagi seluruh masyarakat yang ada di lembaga MAN 4 Kediri tersebut.⁴

Pendidikan kewarganegaraan sebagai leveransir pendidikan karakter

Pendidikan kewarganegaraan sebagai pendidikan karakter merupakan Hal yang penting untuk membentuk karakter peserta didik yang mewakili warga negara yang beradab. Faktanya mereka adalah generasi penerus bangsa, sehingga perlu dipersiapkan secara matang agar bangsa ini memiliki potensi generasi muda yang berkualitas. Karakter Pangasilian adalah kunci untuk mencapai perdamaian, keadilan dan kemakmuran dalam kehidupan negara. Tentu saja, jika korupsi masih ada di antara warga negara, maka kerinduan akan kehidupan berbangsa tidak akan pernah terwujud.

Hal ini jelas diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Tujuan pendidikan kewarganegaraan adalah membekali peserta didik dengan pengetahuan dan keterampilan dasar tentang hubungan kewargaan, yaitu pendidikan bela negara dan menjadikan mereka warga negara yang dapat diandalkan oleh bangsa Indonesia. Pendidikan kewarganegaraan berorientasi pada kebajikan yang sesuai dengan ideologi nasional. Tentu saja korupsi sangat tidak berguna dan sangat bertentangan dengan tujuan Bangsa Indonesia yang mulia, baik dari segi kesejahteraan sosial maupun pendidikan. Koruptor adalah warga negara tanpa karakter. Mereka melakukan tindakan yang memalukan. Dari perspektif agama dan masyarakat, karakteristik yang mengarah pada korupsi sama sekali tidak dapat diterima. Korupsi menimbulkan berbagai kerugian baik individu maupun masyarakat, karena dirampas haknya. Lubis menjelaskan bahwa korupsi merupakan kejahatan yang berdampak serius pada semua bidang kehidupan masyarakat. Korupsi adalah musuh bersama kita dan masalah serius di negeri ini. Korupsi sangat merugikan stabilitas politik suatu negara. Hal itu menghancurkan nilai-nilai demokrasi dan moral bangsa Indonesia serta menjadi penghambat yang kuat bagi terwujudnya masyarakat Indonesia yang adil, damai, dan sejahtera.

Pendidikan kewarganegaraan merupakan pendidikan karakter, karena struktur di keilmuannya sangat membantu pembentukan warga negara

⁴ Tri Karyanti, DKK, *PendidikanAnti Korupsi Berbasis Multimedia Cet:1*, (Yogyakarta, Cv. Budi Utama, 2019), hal.74

Pangasilian. Nasution menegaskan bahwa pendidikan kewarganegaraan diwujudkan dalam tujuan pembelajarannya sebagai pendidikan karakter, yang bertujuan untuk membentuk peserta didik dengan sikap demokratis, positif, kritis dan beradab. Jika warga beradab, korupsi tidak akan terjadi. Pada hakekatnya untuk menginternalisasikan nilai-nilai antikorupsi melalui pendidikan kewarganegaraan, akan efektif jika tujuan pembelajaran difokuskan pada penguatan karakter berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Generasi muda yang anti korupsi merupakan generasi yang dicita-citakan, karena memiliki kapasitas spiritual, intelektual dan emosional yang mumpuni. Generasi yang dicita-citakan tersebut tidak akan pernah terwujud, jika output dan tujuan setiap mata pelajaran hanya berfokus pada ranah peningkatan intelektualitas. Perlu kita tegaskan bahwa koruptor merupakan individu yang berintelektual tetapi tidak bermoral. Paradigma pendidikan untuk merubah output dari proses pembelajaran yang berorientasi pada pembentukan manusia Indonesia yang seutuhnya, merupakan kunci agar pendidikan memiliki dampak kuat dalam mewujudkan kesejahteraan umum.⁵

Nilai-nilai anti korupsi merupakan landasan individu untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi. Nanggala menjelaskan bahwa perilaku korupsi harus diberantas karena membuat bangsa sengsara. Korupsi merupakan preskripsi orang yang tidak takut akan adanya Tuhan, karena mereka tidak memiliki karakter yang sesuai dengan kepribadian bangsa. Nilai-nilai anti korupsi perlu di salurkan kepada peserta didik melalui pendidikan kewarganegaraan sebagai pendidikan karakter di keseharian.

Taja mengungkapkan bahwa ada sembilan nilai anti korupsi yang telah ditetapkan oleh komisi pemberantasan korupsi. Nilai tersebut perlu di sosialisasikan bahkan diinternalisasikan kepada masyarakat Indonesia, khususnya kepada generasi penerus bangsa. Dan adapun sembilan nilai tersebut adalah. 1) inti: yang meliputi jujur, disiplin, dan tanggung jawab, 2) sikap: adil, berani, dan peduli, serta yang ke 3) etos kerja: yang meliputi kerja keras, sederhana, dan mandiri. Proses habituasi nilai-nilai anti korupsi merupakan upaya yang diselenggarakan dalam memusnahkan kejahatan korupsi. Pendidikan kewarganegaraan begitu penting keberadaannya dalam proses pendidikan di

⁵ Puspa Dianti, *Integrasi Pendidikan Karakter Dalam Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Mengembangkan Karakter Siswa*, Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial, Vol. 23, No. 1, 2014=58-68

Indonesia. Disiplin ilmu tersebut perlu dioptimalkan dalam menginternalisasikan nilai-nilai anti korupsi. Dan faktanya struktur keilmuan pendidikan kewarganegaraan sangat relevan dengan konsep pendidikan karakter. Serta peserta didik yang memiliki karakter terpuji tentunya tidak akan pernah melakukan perilaku koruptif, karena perilaku terpuji merupakan bentuk dari kesalehan, sehingga mereka takut akan murka Tuhan yang Maha Kuasa serta mengetahui dampak dari kejahatan korupsi, baik bagi dirinya sendiri dan masyarakat sekitarnya.

Pendidikan kewarganegaraan dengan pendidikan karakter merupakan strategi yang jitu. Namun pada dasarnya kedua kajian ini memiliki tujuan pembelajaran yang karakteristiknya sama yaitu terbentuknya peserta didik yang berkarakter Pancasila. Jika ditinjau dari peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang penguatan pendidikan karakter pada pasal 2 menegaskan bahwa tujuan pendidikan karakter adalah membangun dan membekali peserta didik sebagai generasi emas Indonesia tahun 2045 dengan jiwa Pancasila. Dela A.K, Eko Wulandari, DKK mengutarakan bahwa nyatanya dalam melaksanakan pendidikan kewarganegaraan sebagai pendidikan karakter bukanlah perkara yang mudah. Proses tersebut mengakibatkan kaum pendidik perlu memiliki keteladanan yang baik, karena menginternalisasikan perilaku yang terpuji akan lebih efektif apabila melalui keteladanan dari guru dan tenaga kependidikan. Hal ini tidak bisa dimungkiri bahwa kenyataan seperti ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan bahwasanya keberadaan seorang guru kewarganegaraan dan guru mata pelajaran yang berfokus pada pengembangan karakter peserta didik masih menjadi hambatan dalam memajukan pendidikan bangsa Indonesia.

Dalam konteks menginternalisasikan nilai-nilai anti korupsi kepada peserta didik tentu masih diperlukan usaha yang lebih kuat lagi. Nyatanya tugas tersebut merupakan tantangan tersendiri, khususnya bagi guru kewarganegaraan, karena mereka perlu mengatasi berbagai hambatan pembelajaran dengan menggunakan kreatifitas serta strategi pembelajaran yang tepat dan efektif dalam menginternalisasikan nilai-nilai anti korupsi kepada peserta didik. Lumrah tantangan tersebut terjadi, karena pada hakikatnya Pendidikan Kewarganegaraan berupaya dalam membentuk moralitas peserta didik yang dilandasi oleh Pancasila dan UUD 1945. Azmi menjelaskan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan berperan dalam membentuk perilaku anti

korupsi. Dengan rasionalisasi bahwa Pendidikan Kewarganegaraan memiliki materi yang berkaitan dengan hukum serta akan lebih efektif apabila perilaku tersebut diinternalisasikan melalui project citizen agar membentuk nalar kritis siswa atau peserta didik. Tentu beragamnya literasi yang ditemukan peneliti memperkuat konsep dan realita bahwa menginternalisasikan nilai-nilai anti korupsi kepada peserta didik sangat strategis apabila melalui Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Pendidikan Karakter, karena struktur keilmuannya sangat relevan.

Implementasi Pendidikan Karakter Di MAN 4 Kediri Melalui Kantin Kejujuran

Kantin kejujuran adalah sebuah tempat yang dimana tempat itu menjual makanan dan minuman. Kantin kejujuran biasanya tidak dijaga oleh seorang seperti kantin biasa. Makanan dan minuman di tempatkan di rak makanan seperti di tempat supermarket namun bedanya di kantin kejujuran ini tersedia tempat uang atau kotak uang untuk siswa membayar makanannya atau minuman yang telah mereka ambil serta mereka menghitung dan mengambil kembalian uang mereka sendiri. Berbeda dengan kantin kejujuran yang di terapkan di MAN 4 Kediri, sekolah ini memang menerapkan kantin kejujuran yang sama dengan sekolah lain seumumnya namun perbedaannya di sekolah ini para tenaga kerja atau para pendidik memasang CCTV tersembunyi di tempat kantin kejujuran, hal ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana perkembangan karakter anti korupsi para siswa di MAN 4 Kediri tersebut, dengan memasang CCTV para pendidik bisa memantau langsung siapa siswa yang jujur dan siapa siswa yang tidak jujur. Implementasi pendidikan karakter melalui kantin kejujuran ini sangat menguji kesadaran siswa, karena siswa dituntut untuk berbelanja makanan dan minuman dengan membayar dan mengambil uang kembalian tanpa harus diawasi oleh pegawai kantin.

Pendidikan karakter melalui kantin kejujuran ini disiapkan sebaik mungkin serta mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, salah satunya dari dinas Pendidikan. Kantin kejujuran merupakan upaya sekolah atau lembaga untuk mendidik akhlak siswa agar berperilaku jujur dan diterapkan dalam kesehariannya sampai nanti. Pendidikan karakter melalui kantin kejujuran harus dibangun sejak sekarang, dan dikembangkan di lembaga pendidikan dan bahkan diterapkan secara nyata di dalam masyarakat. Implementasi pendidikan karakter melalui kantin kejujuran di MAN 4 Kediri sangat penting, karena

mendidik dan melatih siswa untuk jujur dan merubah perilaku siswa yang tidak jujur menjadi jujur. Sehingga dengan demikian melalui kantin kejujuran ini dapat menciptakan siswa yang tak hanya cerdas secara intelektual namun juga cerdas secara moral atau tingkah laku yang baik. Tidak hanya demikian pihak sekolah MAN 4 Kediri juga berkerja sama dengan keluarga, masyarakat dan elemen bangsa yang lain demi suksesnya agenda besar menanamkan karakter kepada peserta didiknya sebagai calon penerus bangsa yang akan mendatang.

Sejauh ini impelementasi pendidikan karakter di MAN 4 Kediri melalui kantin kejujuran sudah berjalan cukup baik, namun dari perkembangannya tentu tidak bisa lepas dari berbagai kendala yang dihadapi selama berjalannya kantin kejujuran. Tentunya masih ada sebagian siswa yang belum bisa untuk berbuat jujur, ataupun disiplin serta tanggungjawab, sehingga alhasil pengelola kantin kejujuran mengalami kesulitan. Dan hal ini menjadi tantangan bagi pendidik maupun peserta didik di MAN 4 Kediri. Jika implementasi kantin kejujuran ini mengalami kendala karena ada salah satu siswa yang tidak jujur, hal ini menjadi tantangan untuk para pendidik agar bisa lebih mengawasi serta memberikan motivasi terhadap peserta didik tersebut untuk tidak mengulangi kesalahan dari sifat tercela (mencuri) dan bisa membimbing siswanya untuk berperilaku jujur. Hal ini dilakukan supaya dengan adanya kantin kejujuran ini dapat membangun kehidupan masa depan yang menyatakan dengan sebenarnya dan seakurat fakta-fakta yang terjadi pada masa lalu maupun yang akan datang.

Pelaksanaan pendidikan karakter melalui kantin kejujuran belum bisa maksimal, untuk bisa melatih dan mengimplementasikan nilai kejujuran pada diri siswa. Faktanya program-program pendukung seperti untuk penanaman nilai kejujuran yang disediakan sekolah di luar dari konteks kantin kejujuran masih kurang. Kesadaran siswa untuk bersikap jujur masih kurang yang dibuktikan dengan perolehan tingkat presentase. kejujuran yang belum bisa 100% secara konstan, serta evaluasi yang dilaksanakan sekolah untuk bisa meyakinkan siswa agar bersikap jujur masih kurang. Namun kendala yang paling mendasar dalam pendidikan karakter melalui kantin kejujuran ini adalah kurangnya kesadaran dari para peserta didik itu sendiri, Maupun dari pengawasan pengelola kantin kejujuran sehingga peserta didik seandainya mengambil makanan dengan membayar tetapi mengambil pengembalian yang lebih.

Implementasi Pendidikan Karakter Dan Anti Korupsi Melalui Kegiatan Ekstrakurikuler

Selain melalui implementasi cara yang ada di atas, penanaman pendidikan karakter anti korupsi dapat juga ditanamkan kepada peserta didik melalui kegiatan-kegiatan yang ada di luar pembelajaran. Seperti melalui kegiatan ekstrakurikuler atau kegiatan insidental. Penanaman nilai anti korupsi dengan cara ini lebih mengutamakan pengolahan serta penanaman nilai melalui suatu kegiatan, untuk dibicarakan dan dikupas nilai-nilai hidupnya. Keunggulan dari cara ini yaitu peserta didik akan mendapat nilai-nilai pendidikan karakter dan anti korupsi melalui pengalaman-pengalaman yang konkrit. Pengalaman tersebut akan lebih tertanam dalam jiwa peserta didik.

Jika dibandingkan dengan sekedar informasi apalagi informasi yang menolong, para peserta didik akan lebih terlibat dalam menggali nilai-nilai kehidupan dan pembelajaran yang lebih menyenangkan menurut mereka (siswa). Dan kelemahan dari cara ini adalah tidak adanya struktur yang tetap dalam kerangka pendidikan dan pengajaran di sekolah serta membutuhkan waktu yang lebih banyak. Cara ini juga menuntut para peserta didik dalam kreativitasnya, dan pemahaman yang akan di butuhkan para peserta didik secara mendalam. Tidak hanya sekedar sebuah kegiatan bersama, namun juga dibutuhkan pendamping yang kompak serta mempunyai persepsi yang sama. Dan kegiatan semacam hal ini tidak hanya dilakukan dalam setahun sekali tetapi juga harus dilakukan berulang kali.⁶

Pendidikan Karakter Dan Anti Korupsi Di Implementasikan Melalui Pembudayaan (Pembiasaan)

Salah satu tujuan dari adanya pendidikan karakter anti korupsi adalah mengukuhkan nilai-nilai yang positif ke dalam pikiran dan perasaan peserta didik. Maka dari itu penting bagi seorang pendidik untuk menanamkan nilai-nilai anti korupsi terhadap peserta didik, apalagi jika nilai-nilai pendidikan karakter anti korupsi tersebut bisa ditanamkan melalui pembudayaan dalam seluruh aktifitas dan suasana dalam sekolah. Bentuk dari pembudayaan tersebut akan menimbulkan suatu pembiasaan pada diri setiap peserta didik. bagi peserta didik yang masih usia remaja seperti di MAN 4 Kediri ini pembiasaan sangatlah

⁶ Ma'as Shobirin, *Model Penanaman Antikorupsi Di Sekolah Dasar*, Jurnal Unisula, Vol. 1, No. 2, 2014=107-117

penting, karena dengan pembiasaan itu akhirnya suatu aktivitas akan menjadi milik peserta didik sendiri di kemudian hari.

Pembiasaan yang baik akan membentuk sosok manusia yang berkepribadian yang baik pula. Dan sebaliknya jika dengan pembiasaan yang buruk maka akan membentuk sosok manusia yang berkepribadian buruk. Berdasarkan pembiasaan tersebut peserta didik terbiasa akan menurut, disiplin dan ta'at terhadap peraturan-peraturan yang berlaku di sekolah dan juga di lingkungan masyarakat. Setelah mendapatkan pendidikan pembiasaan antikorupsi di sekolah, pembiasaan tersebut akan terbawa juga dalam kehidupan sehari-hari di rumah maupun sampai dewasa nanti.

Dengan menanamkan budaya pembiasaan yang baik, memang tidaklah mudah bagi pendidik. Dan terkadang membutuhkan waktu yang lama untuk menanamkan nilai-nilai antikorupsi tersebut melalui pembiasaan pada peserta didik. apalagi pada peserta didik yang memiliki kebiasaan yang buruk, sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan tersebut susah pula untuk diubahnya. Tetapi dengan implementasi pembudayaan ini para pendidik bisa menilai bahwa para peserta didik selalu ada peningkatan dalam karakter mereka melalui pembudayaan atau pembiasaan yang baik dalam lingkungan sekolah.

Keunggulan dari implementasi pembudayaan ini adalah semua guru terlibat dan bahkan dapat belajar dari pihak luar untuk mengembangkan diri peserta didik. seorang peserta didik mengenal nilai-nilai hidup untuk membentuk kepribadian mereka yang baik secara informative, maupun diperkuat dengan pengalaman melalui kegiatan-kegiatan yang terencana dengan baik. Lalu kelemahan dari implementasi pembudayaan ini adalah keterlibatan banyak pihak dan banyak waktu untuk koordinasi, selain itu, tidak semua guru mempunyai kompetensi dan keterampilan untuk menanamkan nilai-nilai antikorupsi.⁷

Implementasi Pendidikan Karakter Anti Korupsi Melalui Model Humanistik

Salah satu tujuan pendidikan karakter anti korupsi sepantasnya mengukuhkan nilai-nilai yang positif dalam fikiran peserta didik. Peserta didik bisa berfikir kreatif, berwawasan luas, bahkan menjadi pemimpin yang baik apabila dia menimba suatu nilai-nilai moral yang baik di dalam pembelajaran-

⁷ Ibid, *Model Penanaman Antikorupsi Di Sekolah Dasar*

nya. Salah satu contohnya dalam era yang muktahir ini pendidikan anti korupsi di sekolah dapat mengimplementasikan model pembelajaran humanistik. Yang di antaranya adalah:

- a. Mengembangkan dan menumbuhkan nilai positif siswa, seperti suka menolong, berbuat baik, beriman, serta bertaqwa.
- b. Mengajarkan pesan moral kepada siswa, agar berbuat yang sesuai dengan harapan masyarakat, mencintai keadilan, kebenaran, dan kejujuran.
- c. Mendorong orang untuk berkerja keras demi kepentingan dirinya dan kepentingan bersama.
- d. Memperkukuh dan menumbuh kembangkan karakter pribadi dan ketahanan bangsa yang positif, tangguh, dan kuat, demi mencapai cita-cita bangsa dan negara.

Dalam dunia pendidikan seorang pendidik harus bisa jeli untuk memilih bahan ajar yang sarat dengan nilai-nilai akhlak dan moral dalam pendidikan karakter anti korupsi. Dalam proses pembelajaran seorang guru harus bisa melatih peserta didiknya untuk menjadi individu yang humanistik dengan cara mengapresiasi nilai-nilai lokal yang mendidik, positif, serta luhur. Sudah semestinya, dalam pemilihan bahan ajar yang akan disajikan haruslah disesuaikan dengan kemampuan psikologis peserta didik. dan dari sisi seorang guru harus mau untuk mengajarkan kejujuran di kelas. Mengajarkan kejujuran memang sangat menuntut keteladanan. Guru pun harus bisa merekonstruksi pola pikir siswa agar terbebas dari ketidakadilan dan ketidakjujuran. Banyak buku-buku ajar tentang moral bukan saja merupakan sumber pembelajaran, tetapi juga sarana wajib yang seharusnya terasimpan di perpustakaan sekolah. Disisi lain departemen informasi dan komunikasi harus bisa secara tegas untuk menyaring tayangan yang kurang mendidik bagi peserta didik, contohnya seperti tayangan pornografi, kriminalitas, kekerasan, atau sejenis merampas milik orang lain. Dan disamping itu, secara tegas situs berbahaya haruslah diblokir, lewat tayangan televisi dan berita cetak harus disisipi ajaran kejujuran, untuk pengendalian diri, moralitas, kesatuan dan nasionalisme untuk bekal siswa jika sudah terjun di dunia masyarakat nantinya.⁸

⁸ Rosida Tiurma Manurung, *Pendidikan Anti Korupsi Sebagai Satuan Pembelajaran Berkarakter Dan Humanistik*, Jurnal Cedekia, vol.11, No.27, 2012=232-244

Implementasi Pendidikan Karakter Anti Korupsi Melalui Dilema Moral

Membahas tentang korupsi tentu hal tersebut tidak jauh juga dari kata moral. memang benar korupsi merupakan sebuah persoalan tentang moralitas seseorang. Namun bagi seseorang yang memiliki tingkat moralitas yang baik tidak akan melakukan tindakan tak tepuji atau korupsi. Oleh sebab itu, pendidikan moralitas sangat penting untuk di tanamkan di lembaga-lembaga pendidikan, karena moral itu untuk mengatasi permasalahan korupsi yang terjadi saat ini. Dan tentunya pendidikan moral nanti akan bemuara pada karakter pada siswa. Moal yang baik tidak akan melakukan tindakan yang buuk oleh karena itu orang yang baik tidak akan melakukan tindakan koupsi. Menurut pendapat Davis istilah moral juga sering digunakan dalam pengertian evaluatif yang berarti moral dengan benar sebagai lawan salah secara moral atau tidak moral.⁹ Ketika beberapa tindakan tertentu dibicarakan sebagai *hal bermoral* dalam situasi tertentu apa yang tersirat tidak hanya bahwa itu adalah ertanyaa tentang benar dan salah. Tetapi itu adalah tindakan yang benar. Hall Dan Davis mengemukakan definisi moral sebagai berikut “dalam arti asli dan istilah moral mengacu kepada isu-isu pertimbangan nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang relevan.”¹⁰

Karena korupsi erat kaitannya dengan moral, di MAN 4 Kediri ini, tentunya para guru juga mendidik moral anak-anak agar bisa menjadi generasi penerus bangsa yang memiliki moral anti koupsi *karena korupsi merupakan salah satu tindakan yang buruk*. Dan cara para guru MAN 4 Kediri untuk menerapkan moral yang baik kepada para peserta didiknya yaitu melalui metode Dilema Moral. Kohlberg menggunakan kasus Dilema Moral dalam merumuskan konsep perkembangan moral. Dilema moral merupakan sebuah keadaan dimana seseorang dihadapkan pada suatu permasalahan yang harus diselesaikan oleh seseorang. Naun dalam penyelesaiaanya terdapat pertentangan hati dan pertentangan anyara nilai-nilai yang diyakini. Dan bagaimana keputusan yang diambil dapat dipisahkan ke dalam tiga tahapan perkembangan yang diantaranya yang 1) tingkat Prakonvensional, 2) tingkat Konvensional 3) Tingkat Pascakonvensional.¹¹

⁹ R.T. Hall, dan J.U. Davis, *Moral education In Theory abd Practice*, (New York, Promotheus, 1975), hal.15

¹⁰ Ibid, *Moral Education*, hal.15

¹¹ Santrock, J.W, *Life-Span Development : Perkembangan Masa Hidup*, “Terjemeahan Judan Damanik dan Achmad Chusairi”, (Jakarta, Erlangga, 2002), hal.5

Dilema moral ini dapat digunakan sebagai metode pembelajaran dalam melaksanakan pendidikan anti korupsi. Pendidikan anti korupsi melalui dilema moral ini dapat dilakukan dengan memberikan sebuah kasus dilema moral yang berkaitan dengan korupsi atau nilai-nilai universal seperti kejujuran dan melakukan perbuatan yang baik, untuk semua orang yang harus diselesaikan peserta didik, dan penyelesaian dari peserta didik nanti akan dibahas dan disesuaikan dengan tingkat perkembangan yang di kemukakan oleh Kohlberg tadi. Jika penyelesaian atau keputusan yang dipilih peserta didik sudah mengarah pada 3 tahapan tadi, berarti peserta didik tersebut sudah bisa dikatakan bermoral baik.

Penutup

Di Madrasah Negeri 4 Kediri ini sudah menerapkan pendidikan karakter anti korupsi yang dibidang cukup baik, biasanya para guru-guru dan staf-staf menerapkan pendidikan karakter tersebut dengan memadukan dengan jam-jam pelajaran dikelas.

Namun tak hanya itu, di dalam pendidikan karakter anti korupsi di lembaga MAN 4 Kediri ada beberapa macam cara yang digunakan untuk membantu siswa agar menanamkan pendidikan karakter tersebut. Dan diantaranya yaitu:

Penanaman pendidikan karakter anti korupsi melalui pembelajaran CARILEM, model pembelajaran karakter anti korupsi berbasis multimedia. Pendidikan kewarganegaraan sebagai leveransir pendidikan karakter, implementasi pendidikan karakter Di MAN 4 Kediri melalui kantin kejujuran, implementasi pendidikan karakter dan anti korupsi melalui kegiatan ekstrakurikuler, pendidikan karakter dan anti korupsi di implementasikan melalui pembudayaan (pembiasaan) dan implementasi pendidikan karakter anti korupsi melalui model humanistik.

Daftar Pustaka

- DA. Intan Hestika , DKK, *Menumbuhkan Pendidikan Karakter Anti Korupsi Melalui Model Pembelajaran Carilem*, Jurnal Unimus, 2017.
- Dianti Puspa, *Integrasi Pendidikan Karakter Dalam Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Mengembangkan Karakter Siswa*, Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial, Vol. 23, No. 1, 2014=58-68

- Hakim Lukman, *Model Integrasi Pendidikan Antikorupsi Dalam Kurikulum Pendidikan Islam*, jurnal Pendidikan Islam-Ta'alim. Vol. 10, No.2, 2012=145
- Hall R.T., dan Davis J.U., *Moral education In Theory and Practice*, New York, Prometheus, 1975
- Karyanti Tri, DKK, *Pendidikan Anti Korupsi Berbasis Multimedia Cet:1*, Yogyakarta, Cv. Budi Utama, 2019
- M. Tiurma Rosida, *Pendidikan Anti Korupsi Sebagai Satuan Pembelajaran Berkarakter Dan Humanistik*, Jurnal Cendekia, Vol.11, No.27, 2012=232-244
- Ma'as, *Model Penanaman Antikorupsi Di Sekolah Dasar*, Jurnal Unisula, Vol. 1, No. 2, 2014=107-117
- Mardiyanti Fitri, *Implementasi peran supervisor dalam pengawasan manajerial dan faktor-faktor memengaruhi kinerja tenaga administrasi sekolah*, Jurnal Cendekia, Vol. 3 No. 4, 2020=308–313
- Santrock, J.W, *Life-Span Development : Perkembangan Masa Hidup*, "Terjemahan Judan Damanik dan Achmad Chusairi", Jakarta, Erlangga, 2002

Copyright © 2021 **Journal Salimiya**: Vol. 2, No. 3, September 2021, e-ISSN; 2721-7078

Copyright rests with the authors

Copyright of **Jurnal Salimiya** is the property of **Jurnal Salimiya** and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder's express written permission. However, users may print, download, or email articles for individual use.

<https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/salimiya>